



Analisis Penegakan Hukum Terkait Pemberian Fasilitas Pengelolaan Sampah Yang Tidak Merata
Analysis of Law Enforcement Regarding the Univen Delivery of Waste Management Facilities

Anggita Diva Amelya
202040100008

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum
Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Penegakan Hukum Terkait Pemberian fasilitas Pengelolaan Sampah yang Tidak Merata

Nama Mahasiswa : Anggita Diva Amelya

NIM : 202040100008

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Analysis of Law Enforcement Regarding the Univen Delivery Of Waste Management Facilities 14 pt Bold

Analisis Penegakan Hukum Terkait Pemberian Fasilitas Pengelolaan Sampah yang Tidak Merata 14 pt Bold-Title Case

I. Pendahuluan

Sampah merupakan suatu bahan yang tercipta karena sisa-sisa yang dihasilkan oleh manusia saat melakukan suatu produksi disetiap harinya, baik produksi industry maupun produksi rumah tangga seperti sisa-sisa olahan setelah memasak.[1] Saat ini sampah masih menjadi suatu permasalahan yang besar di Indonesia, karena volume sampah semakin setiap harinya semakin bertambah banyak, terutama pada kota-kota besar di Jawa. Jika dijadikan satu dengan kota-kota di daerah lain, sampah di Indonesia memiliki ketinggian yang melebihi dari tingginya candi Borobudur.[2]

Permasalahan mengenai sampah ini dapat dikatakan sibuk karena kurang tegasnya pemerintah dalam mengatur tentang pengelolaan sampah, pemerintah juga membuat program-program untuk mengurangi sampah disetiap tahunnya, namun sayangnya ada saja program yang pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana atau terlaksana hanya di Sebagian daerah saja.[3]

Selain itu minimalisnya tempat yang akan digunakan untuk mengelola sampah juga menjadi salah satu faktor dari permasalahan yang ada. Selain itu jikalau pun pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah, masih ada hambatan bagi masyarakat untuk mengelola saampahnya dikarenakan pemberian fasilitas pengelolaan sampah yang tidak merata.[4]

Dalam **Undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah**, menjelaskan tugas-tugas dari pemerintah yang lebih tepatnya tertulis dalam Pasal 6 huruf D melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah merupakan tugas dari pemerintah. Yang dimaksud tugas pemerintah dalam undang-undang tersebut merupakan pemerintahan pada setiap daerah atau kota masing-masing. Dimana hal tersebut akan diatur dalam peraturan bupati di setiap daerah atau kota.[5]

Di Indonesia ada kurang lebih 416 kabupaten, dari sekian banyak kabupaten ada kurang lebih 211 kabupaten yang memiliki Peraturan Bupati(Perbup) yang membahas tentang pengelolaan sampah pada masing-masing daerah,[6] namun yang menjadi permasalahan adalah berjalannya peraturan tersebut, dimana fasilitas yang diberikan atau janji oleh pemerintah sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan tidak terlaksana dengan baik, contohnya seperti pemerian fasilitas pada masyarakat tidak merata. Sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di desa-desa pelosok belum bisa merasakan fasilitas yang telah dijanjikan dalam peraturan tersebut, dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengelola sampah di desanya. Hal tersebut juga yang memicu masyarakat untuk membuang sampahnya di sembarang tempat atau bahkan memlakukan pembakaran sampah disembarang tempat seperti di pinggiran jalan atau di dalam selokan yang tidak dialiri air.

Pada penelitian sebelumnya lebih banyak yang membahas tentang tata cara pengelolaannya[7] namun tidak didampingi dengan pembahasan mengenai prasarana dan sarana yang akan digunakan oleh masyarakat yang seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk masyarakat agar masyarakat tidak kesulitan untuk melakukan pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalnya.

Rumusan masalah: Pemberian fasilitas untuk pengelolaan sampah yang tidak merata sehingga mengakibatkan masyarakat yang tidak menerima fasilitas mengalami kesulitan untuk mengelola sampah yang dihasilkannya.

Pertanyaan penelitian: Bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas untuk pengelolaan sampah yang sama dengan masyarakat lain yang sudah menikmati fasilitas tersebut terlebih dahulu?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 10 yang membahas ketidak setaraan..

II. Metode

Metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan mencari berita-berita mengenai permasalahan sampah pada platform social media dan juga internet. Serta menelaah undang-undang yang membahas tentang pengelolaan sampah dan juga mencari data banyaknya Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di daerah masing-masing dalam website JDIH BPK RI. Dengan begitu saya mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang akan saya bahas pada penelitian kali ini.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Referensi

- [1] "Urus Sampah Jangan Sampai Salah." <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6612126/urus-sampah-jangan-sampai-salah> (accessed May 13, 2023).
- [2] "Ngeri! Tumpukan sampah di Indonesia bisa menyaingi tinggi Candi Borobudur." <https://kejarimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-menyaingi-tinggi-candi-borobudur-90.html> (accessed May 13, 2023).
- [3] diskominfo@badungkab.go.id, "Website Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Badung," *Website Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Badung*. <https://dislkh.badungkab.go.id/artikel/http:/> (accessed May 13, 2023).
- [4] DMCDompetDhuafa, "Minimnya Ketersediaan Tempat Pembuangan, Picu Polusi Sampah," *Disaster Management Center Dompet Dhuafa*, Nov. 04, 2022. <https://dmcdompetdhuafa.org/minimnya-ketersediaan-tempat-pembuangan-picu-polusi-sampah/> (accessed May 13, 2023).
- [5] "UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [JDIH BPK RI]." <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008> (accessed May 13, 2023).
- [6] "Search [JDIH BPK RI]." <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=sampah&jenis=20> (accessed May 13, 2023).
- [7] J. Jumarianta, "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI PENELITIAN DI DESA KARANG INTAN KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)," *-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 2, no. 2, p. 118, Mar. 2018, doi: 10.31602/as.v2i2.1180.